



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 258 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
HASIL PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2023

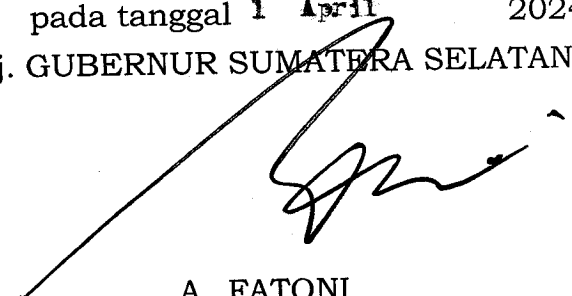
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 020/208/Ban.KBP/2024 tanggal 15 Januari 2024 mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah hasil pengadaan Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah setiap tahun untuk kepentingan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pengguna Barang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KETIGA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah dimaksud.
- KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diuraikan dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 April 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel di Palembang